

## ABSTRAK

Kekacauan yang terjadi di Indonesia bukan sekedar disebabkan oleh struktur hukumnya tetapi juga disebabkan oleh peraturan yang dibuat tanpa dilakukan analisis dan pengkajian yang lebih sebelum di tetapkannya suatu peraturan. Khususnya dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dimana suatu peraturan perundang-undangan seharusnya mampu membatasi dan memberikan perlindungan penuh terhadap masyarakatnya. Sering kali setiap peraturan perundang-undangan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap perlu diperhatikan dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan. Akibatnya undang-undang hanya sebagai hiasan atau pelengkap tidak dijadikan sebagai acuan yang sangat mendasar dalam menjalankan prinsip hukum yang sebenar-benarnya. Hal ini menyebabkan tidak terkendalinya pengelolaan lingkungan dengan benar yang menyebabkan kerusakan lingkungan khususnya kabupaten indramayu yang sebenarnya besar dengan kawasan pertanian. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan peran pemerintah atau masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dampak lingkungan. Serta ingin mengetahui sejauh mana keefektipan undang-undang sebagai payung hukum yang mengatur lingkungan hidup dan apa peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rencana tata ruang wilayah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana perundang-undangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka untuk mencari data yang dipergunakan dititik beratkan kepada data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Indramayu tidak sah karena bukan kewenangan dari Bupati dan terdapat kecacatan hukum karena tidak dipenuhinya tahapan atau persyaratan keluaranya izin lingkungan yaitu tidak adanya peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL sebagai salah satu syarat wajib dari izin lingkungan.

## **ABSTRACT**

*The mess occurred in Indonesia is not merely because of the legal structure but also the regulation that made lack of analysis and a deeper study. Especially in the making of constitution regulation, which should limit and provide full protection for society. Oftentimes, in the making of constitution regulation, the constitution regulation disregards the important rules which need to be noticed instead. As a result, the constitution regulation is merely a compliment, does not act as a basic reference in carrying out the straight legal fundamental. Therefore, it caused uncontrolled environmental management, environmental damage, especially in Kabupaten Indramayu which has a large agricultural area. In consequence, this research aims to discover how the environment management and the role of the government or community which directly impact the environment do. Furthermore, it aims to discover how effective the Constitution act as a legal regulation in controlling the environment and what regional environmental management does in regional layout planning.*

*The method used in this research was descriptive analysis, it means that the research describes how the Constitution regulates the rules of the environment and regional layout planning. The approach used in this research was a normative juridical approach, the collected data were focused on secondary data, which obtained from a literature study and field study.*

*According to the result, an Environmental Permit for Electric Steam Power Plant (PLTU) in Kabupaten Indramayu is invalid. That is because not only the permit is not the authority of the Regent but also, it has a legal defect due to incomplete steps or requirements in issuing the environmental permit, which means there is no community participation in the making of AMDAL document as one of the mandatory requirements from the environmental permit.*